



Analisis Rasio Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi Keuangan Kabupaten Garut

Analysis of the Ratio of Independence, Effectiveness and Efficiency of Original Regional Revenue in the Garut Regency Financial Realization Report

Emilia Oktaviani & Yushita Marini

Prodi Akuntansi Keuangan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka,
Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan di Kabupaten Garut dengan menganalisis rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Realisasi Keuangan Anggaran Pemerintah Daerah di Kabupaten Garut. Rasio Kemandirian dilakukan untuk mengukur sejauh mana kabupaten Garut dapat menghasilkan pendapatan sendiri tanpa bergantung pada sumber pendapatan eksternal. Pengukuran Rasio Efektivitas dan Efisiensi digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Garut digunakan dengan optimal mencapai tujuan pembangunan. Analisis data akan menggunakan Metode statistik deskriptif dengan data yang berasal dari Laporan Realisasi Keuangan Anggaran Pemerintah Kabupaten Garut periode tahun 2017 sampai dengan 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Garut mengalami penurunan kemandirian keuangan antara tahun 2017 hingga 2018, namun meningkat di tahun 2019 hingga 2021 yang dipengaruhi oleh hubungan intruktif pemerintah pusat. Untuk efektivitas keuangan berada dibawah 100% dari tahun 2017 hingga 2019, tetapi naik di atas 100% di tahun 2020 hingga 2021. Efisiensi keuangan tahun 2017 sampai dengan 2019 kurang dari 100%, naik melebihi 100% pada tahun 2020, kembali turun sebesar 99,25% pada tahun 2021, menunjukkan perlunya penyesuaian belanja dengan pendapatan, memaksimalkan potensi pendapatan asli dan mengoptimalkan sektor potensial untuk menjaga stabilitas keuangan pemerintah Kabupaten Garut yang lebih baik.

Kata Kunci: Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Pendapatan Asli Daerah

Abstract

This research aims to determine financial performance in Garut Regency by analyzing the independence ratio, effectiveness ratio and efficiency ratio of Regional Original Income (PAD) in the Financial Realization Report of the Regional Government Budget in Garut Regency. The Independence Ratio is carried out to measure the extent to which Garut district can generate its own income without depending on external sources of income. The effectiveness and efficiency ratio measurement is used to evaluate the extent to which the Garut Regency Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) is used optimally to achieve development goals. Data analysis will use the descriptive statistical method with data originating from the Garut Regency Government Budget Financial Realization Report for the period 2017 to 2021. The results of the research show that Garut Regency experienced a decline in financial independence between 2017 and 2018, but increased in 2019 to 2021 which influenced by the instructive relations of the central government. Financial effectiveness was below 100% from 2017 to 2019, but rose above 100% in 2020 to 2021. Financial efficiency from 2017 to 2019 was less than 100%, rose to more than 100% in 2020, then fell again by 99.25% in 2021, indicating the need to adjust spending to income, maximize potential original income and optimize potential sectors to maintain better financial stability of the Garut Regency government.

Keywords: Independence Ratio, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Regional Original Income

How to Cite: Emilia Oktaviani & Yushita Marini. (2023). Analisis Rasio Kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Realisasi Keuangan Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Keuangan dan Bisnis (JIKABI)*, 2(2) 2023: 97-105,

*E-mail: emiliaoktaviani29@gmail.com

ISSN 2830-1684 (Online)

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 1 disebutkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan diberlakukannya otonomi daerah Kabupaten Garut bertanggung jawab untuk menjadi lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat bahkan masyarakat Kabupaten Garutnya sendiri. Pada era otonomi daerah, terjadi pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Halim (2007) mengungkapkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemda dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah tersebut perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu dikatakan daerah dikatakan mandiri, efektif, dan Akuntabel sehingga diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi merupakan alat yang digunakan untuk mengukur bagaimana keuangan daerah dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Rasio kemandirian menggambarkan sejauh mana daerah dapat bergantung pada pendapatan lokalnya sendiri, sementara rasio efisiensi pengukuran sejauh mana penggunaan PAD dapat menghasilkan hasil yang optimal. Rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi merupakan alat yang digunakan untuk mengukur bagaimana keuangan daerah dan efisiensi penggunaan sumber daya. rasio kemandirian menggambarkan sejauh mana daerah dapat bergantung pada pendapatan lokal sendiri, sementara rasio efisiensi pengukuran sejauh mana penggunaan PAD dapat menghasilkan hasil yang optimal. Tujuan umum laporan keuangan daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai sumber daya.

Beberapa permasalahan keuangan daerah yang dihadapi Kabupaten Garut antara lain, ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercermin dari penerimaan pendapatan asli daerah yang sampai saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan pendapatan transfer yang merupakan pendapatan dana perimbangan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Transfer Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan kajian latar belakang masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul Analisis Rasio kemandirian, Efektivitas dan Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Keuangan Anggaran Pemerintah Kabupaten Garut periode 2017-2021. Untuk Menilai Kinerja keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan dilihat dengan menganalisis : (1) Rasio Kemandirian keuangan daerah, (2) Rasio Efektivitas, dan (3) Rasio Efisiensi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan diuraikan dalam karya ilmiah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kemandirian Keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Garut dalam Periode 2017-2021.
2. Bagaimana Efektivitas Penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh pemerintah Daerah di Kabupaten Garut Periode 2017-2021.

3. Bagaimana Tingkat Efisiensi dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah daerah di Kabupaten Garut periode 2017-2021.

BATASAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas batasan masalah peneliti ini mencakup fokus pada wilayah Kabupaten Garut, dengan rentan waktu dari tahun 2017-2021, variabel utama yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD), sumber data yang berasal dari laporan realisasi keuangan anggaran pemerintah daerah kabupaten garut dan sumber data lainnya yang relevan, serta penggunaan metode penelitian kepustakaan dan analisis data kuantitatif tanpa melibatkan survei lapangan atau wawancara secara langsung.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk menganalisis bagaimana tingkat Kemandirian keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Garut selama periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh pemerintah daerah Kabupaten Garut selama periode 2017-2021.
3. Untuk mengukur bagaimana tingkat Efisiensi dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh pemerintah daerah kabupaten garut selama periode 2017-2021.

METODE PENELITIAN

DESAIN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan di Kabupaten Garut dengan menganalisis rasio kemandirian, rasio Efektivitas dan rasio efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada laporan Realisasi keuangan Anggaran pemerintah daerah di Kabupaten Garut periode 2017-2021.

SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

Subjek dalam penelitian ini adalah Analisis Rasio kemandirian, Rasio efektivitas, dan Rasio efisiensi pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Garut Periode 2017-2021.

TEKNIK MENGUMPULKAN DATA

Teknik pengumpulan data yaitu metode penelitian kepustakaan. Metode ini digunakan oleh penulis untuk melakukan pengumpulan data dengan cara mempelajari dan membandingkan sumber-sumber informasi seperti: artikel jurnal, tulisan ilmiah, situs internet serta literatur-literatur lain yang dipertanggung jawabkan, kemudian data yang dikumpulkan tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yaitu melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data keuangan yang diperoleh untuk memecahkan masalah yang ada sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tolak ukur yang akan digunakan dalam teknik analisis ini adalah :

- Rasio kemandirian
- Rasio efektivitas
- Rasio efisiensi

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN PUSTAKA

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi Khusus, Dana darurat dan pinjaman . Menghitung rasio kemandirian berdasarkan masing-masing Tahun anggaran yang diformulasikan sebagai berikut (Halim, 2002:128):

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Sumber: Halim (2002:128)

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer (sumber data eksternal). Semakin tinggi Rasio kemandirian Keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan demikian pula sebaliknya, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah. Semakin tinggi masyarakat pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pola Hubungan Dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Halim (2002)

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard (2001:168) Mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut:

- Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah(daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
- Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola hubungan pasipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
- Pola hubungan deligatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuanfan kepada pemerintah daerah.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Keuangan (disebut “Rasio menunjukan pemerintah

$$REKD = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100 \%$$

Efektivitas daerah (EKD”) kemampuan daerah dalam

memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi,2010), hal ini menjadi indikator krusial dalam menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola penerimaan daerah dalam mengelola penerimaan pajak dan retribusi serta memobilisasi sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan fiskalnya. Dengan memahami dan mengoptimalkan rasio ini, pemerintah daerah dapat memperbaiki strategi dan kebijakan guna meningkatkan pendapatan daerah yang menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan lokal. Rasio Efektivitas keuangan daerah bisa diukur menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Sumber : Halim dan kusufi,2007

Rasio Efektivitas dihitung dengan membagi jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan berdasarkan kemampuan riil daerah (Halim dan Kusufi,2017). Tujuan dari mengukur Rasio Efektivitas Penerimaan Asli Daerah (PAD) adalah untuk menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengumpulkan pendapatan sesuai dengan target awal. Kemampuan daerah untuk melakukan tugas ini dianggap efektif jika persentase rasio yang tercapai minimal 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi persentase dari rasio efektivitas tersebut, semakin baik kemampuan daerah dalam mengelola keuangan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektivitas apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Kriteria Rasio Efektivitas PAD menurut Mahsun (2009), adalah:

- a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (X < 100%) berarti tidak efektif.
- b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (X = 100%) berarti efektifitas berimbang.
- c. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (X > 100%) berarti efektif

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima . kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja keuangan pemerintah daerah melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (Satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisiensi atau tidak. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut:

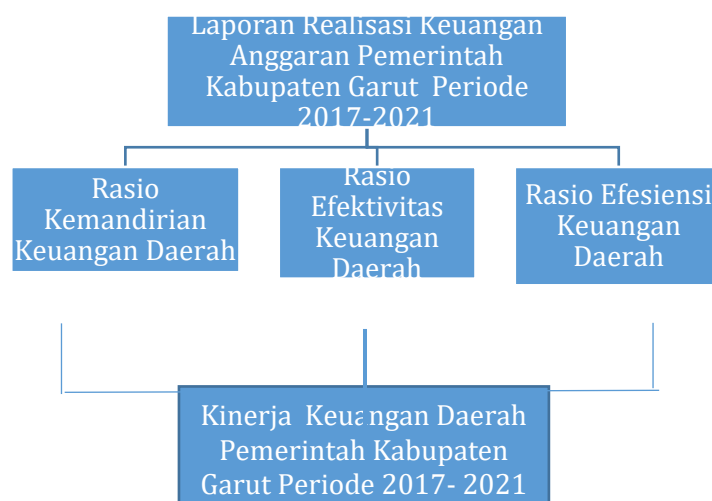
Tabel 1.2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisiensi
100%	Efisiensi Berimbang
Kurang dari 100%	Efisiensi

Sumber: Mohamad Mahsun (2012:187)

Kerangka Kerja Penelitian

Gambar 1. Kerangka Kerja penelitian



B. Deskripsi Objek Penelitian

Sejarah Garut tak bisa dilepaskan dari Kabupaten Limbangan. Kabupaten Limbangan adalah Kabupaten lama yang ibu kotanya dipindahkan ke Garut kini karena sering kali terjadi bencana alam berupa banjir yang melanda daerah ibu kota. Selain itu, kurang berkembangnya pusat pemerintahan karena jauh dari sungai yang menjadi sarana transportasi dan irigasi areal pesawahan dan perkebunan. Bupati Adiwijaya (1813–1831) membentuk panitia survei lokasi untuk ibu kota kabupaten yang baru. Pilihan akhirnya jatuh di tempat yang dikelilingi gunung dan memiliki mata air yang mengalir ke cimanuk. Tempat tersebut berjarak ± 17 km dari pusat kota lama. Saat menemukan mata air, seorang panitia kakarut (bahasa sunda: tergores) belukar. Orang Belanda yang ikut survei tak dapat menirukan kata tadi, dan menyebutnya gagarut. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administratif sebesar 306.519 Ha (3.065,19 km²). Sebagian besar wilayah kabupaten ini adalah pegunungan, kecuali di sebagian pantai selatan berupa dataran rendah yang sempit. Di antara gunung-gunung di Garut adalah: Gunung Papandayan (2.262 m) dan Gunung (2.249 m), keduanya terletak di perbatasan dengan Kabupaten Bandung, serta Gunung Cikuray (2.821 m) di selatan kota Garut. Kabupaten Garut yang secara geografis berdekatan dengan Kota Bandung sebagai ibu kota provinsi Jawa Barat, merupakan daerah penyangga dan hinterland bagi pengembangan wilayah Bandung Raya. Karena itu, Kabupaten Garut mempunyai kedudukan strategis dalam memasok kebutuhan warga Kota dan Kabupaten Bandung, sekaligus berperan di dalam pengendalian keseimbangan lingkungan.

C. Analisis Data

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Hasil dari perhitungan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat di lihat di Tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Perhitungan Rasio Kemandirian keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Garut Anggaran Tahun 2017-2021

Tahun Anggran	Realisasi PAD (dalam rupiah)	Total Pendapatan (dalam rupiah)	RKKD %	Pola Hubungan
2017	692.255.365.083,00	4.422.978.254.586,00	15,65	Instruktif
2018	421.299.024.535,00	4.301.343.515.211,00	9,79	Instruktif
2019	486.565.326.730,00	4.794.836.329.500,00	10,14	Instruktif
2020	474.636.531.982,00	4.496.835.424.032,00	10,55	Instruktif
2021	560.783.376.918,61	4.684.404.923.196,61	11,97	Instruktif

Sumber: Data LKPD Kabupaten Garut (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Rasio Kemandirian Keuangan daerah (RKKD) menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak eksternal dalam hal ini bantuan dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan dan pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Berawal pada tahun 2017 Rasio Kemandirian sebesar 15,65% kemudian turun menjadi 9,79% ditahun 2018, kemudian ditahun 2019 Rasio kemandirian sebesar 10,14% lalu di Tahun 2020 Rasio kemandirian 10.55% kemudian ditahun 2021 naik lagi menjadi 11,97%. pola kemandirian keuangan masih tergolong pola hubungan Intruktif karena tergolong dalam interval 0- 25% dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah itu sendiri.

2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas semakin baik kinerja pemerintah daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Efektivitas PAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Garut Anggaran Tahun 2017-2021

Tahun Anggaran	Target PAD (Dalam upiah)	Realisasi PAD (Dalam Rupiah)	REPAD (%)	kriteria
2017	714.955.896.619,17	692.255.365.083,00	96,82	Tidak Efektif
2018	456.722.126.686,00	421.299.024.535,00	92,24	Tidak Efektif
2019	501.247.176.351,00	486.565.326.730,00	97,07	Tidak Efektif
2020	446.798.360.174,04	474.636.531.982,00	106,23	Efektif
2021	492.892.942.188,00	560.783.376.918,61	113,77	Efektif

Sumber : Data LKPD Kabupaten Garut (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada Rasio efektivitas PAD dapat diketahui bahwa efektifitas PAD Kabupaten Garut pada tahun 2017 sebesar 92,82% tahun 2018 sebesar 92,24%. tahun 2019 naik menjadi 97,07%. Di tahun 2020 mengalami kenaikan lagi menjadi 106,23% dan kemudian ditahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 113,77%. Menurut uraian dan hasil perhitungan pada Rasio efektivitas PAD Kabupaten Garut dapat diketahui bahwa efektivitas keuangan kabupaten garut pada tahun 2017-2019 dapat dikatakan tidak efektif, karena nilai yang diperoleh masih dibawah 100% yaitu tahun 2017 sebesar 92,82%, tahun 2018 sebesar 92,24% dan tahun 2019 sebesar 97,07%. Sedangkan Tahun 2020 dan 2021 sudah dikatakan efektif karena nilai yang diperoleh melebihi 100% dengan nilai rasio tahun 2020 sebesar 106,23% dan tahun 2021 sebesar 113,77%. Pemerintah Kabupaten Garut harus terus mengoptimalkan penerimaan potensi pendapatannya yang sudah telah ada dan mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Pemerintah Daerah diharapkan tidak terpaku dengan target yang telah mereka tentukan sebelumnya dan selalu memaksimalkan potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah, didaerah tersebut sehingga bisa melampaui target yang telah ditentukan sebelumnya alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk meningkatkan potensi daerah antara lain mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Hasil dari perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Anggaran Tahun 2017-2021

Tahun Anggaran	Realisasi Belanja (dalam rupiah)	Realisasai Pendapatan (dalam rupiah)	REKD %	Kriteria
2017	4.369.933.640.924,00	4.422.978.254.586,00	98,80	Efisien
2018	4.257.224.285.897,00	4.301.343.515.211,00	98,97	Efisien
2019	4.594.611.035.095,00	4.974.836.329.500,00	95,82	Efisien
2020	4.573.907.976.515,00	4.496.835.424.032,00	101,71	Tidak Efisen
2021	4.649.602.155.581,00	4.684.404.923.196,61	99,25	Efisien

Sumber: Data LKPD Kabupaten Garut (diolah)

Berdasarkan perhitungan pada rasio Efisiensi keuangan daerah diketahui realisasi total pendapatan daerah Kabupaten Garut pada tahun 2017 pendapatan daerah Kabupaten Garut 4.422.978.254.586,00 pada tahun 2018 4.301.343.515.211,00, mengalami kenaikan pada tahun 2019 yaitu menjadi 4.974.836.329.500,00. Dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 4.496.835.424.032,00 dan 2021 menjadi 4.684.404.923.196,61. Sedangkan Total belanja daerah Kabupten Garut tahun 2017 sebesar 4.369.933.640.924,00, mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 4.594.611.035.095,00, dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 4.594.611.035,00 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 4.573.907.976.515,00 dan pada tahun 2021 menjadi 4.649.601.155.581,00.

Berdasarkan perhitungan Rasio Efisiensi keuangan daerah juga diketahui bahwa Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Garut tahun 2017 sebesar 98,80% dapat dikatakan Efisiensi karena kurang dari 100%, tahun 2018 98,97% dikatakan efisiensi karna kurang dari 100%, pada tahun 2019 sama dikatakan Efisiensi karna kurang dari 100% yaitu 95,82%. pada tahun 2020 sebesar 101,71% dikatakan Tidak Efisiensi karena melebihi 100%. Dan tahun 2021 sebesar 99,25% dikatakan Efisien karena kurang 100%. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Garut dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan dengan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan Efisiensi belanja daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Kinerja keuangan kabupaten Garut dilihat dari Rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Garut menunjukkan penurunan dari tahun 2017 hingga 2018, tetapi mengalami peningkatan selanjutnya hingga tahun 2021. Pola hubungannya masih tergolong instruktif dengan peranan pemerintah pusat yang lebih dominan.

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (REKD)

Kinerja keuangan Kabupaten Garut jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Garut pada tahun 2017-2019 efektivitas PAD masih dibawah 100% menunjukan kinerja Tidak efektif , Namun mengalami peningkatan seiring tahunnya, melebihi 100% pada tahun 2020 hingga 2021 menunjukan kinerja menjadi efektif.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD)

Kinerja keuangan Kabupaten Garut jika dilihat dari Rasio Efisiensi keuangan daerah mengalami variasi. Tahun 2017-2019 tergolong efisien (kurang dari 100%), namun melebihi 100% pada tahun 2020 dan kembali efisien pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian belanja dengan pendapatan.

Dalam keseluruhan, kinerja keuangan daerah Kabupaten Garut perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi dan kemandirian yang lebih baik. Pemerintah daerah harus memaksimalkan potensi pendapatan asli, mencari sumber pendanaan baru, dan mengoptimalkan sektor-sektor potensial. Peningkatan efektivitas dan efisiensi keuangan daerah akan membantu mewujudkan kemandirian yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fathah, Rigel Nurul. "Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul." *Ebbank* 8.1 (2017): 33-48.
- Habiburrahman, Habiburrahman, and Rahmah Imani. "Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Universitas Bandar Lampung* 6.2 (2016): 471249.
- Handoko, Bagus, A. Pratama, and M. Sarah. "Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Pajak Daerah Terhadap Efisiensi Belanja Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara." *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 10.1 (2019): 1-14.
- Kartika, Deuis, Ade Budi Setiawan, and Indra Cahya Kusuma. "Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi." *Jurnal Sosial Humaniora* 7.2 (2016): 143-151.
- Mahsun, Mohamad. 2019. Pengukuran kinerja sektor publik. Tangerang selatan-15418 Banten: Universitas Terbuka.
- Purbandari, Theresia. "Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Aktivitas, dan Rasio Pertumbuhan untuk Mewujudkan Efisiensi Anggaran (Studi pada Kabupaten Madiun)." *Jurnal Pemerintahan, Pembangunan Dan Inovasi Daerah* 1.1 (2019): 15-33.
- Ramadhani, Febby Randria. "Analisis kemandirian dan efektivitas keuangan daerah di Kota Tarakan tahun 2010-2015." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14.1 (2016): 85-98.
- Sibuan, Nurhikmah. "ANALISIS RASIO KEMANDIRIAN TERHADAP LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOROTAI". *MITITA JURNAL PENELITIAN* 1.3 (2023): 72-78.
- Susanto, Hery. "Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram." *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis* 7.1 (2019): 81-92.
- Tamallo, Ester. "ANALISIS RASIO EFEKTIFITAS KEUANGAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KOTA MAKASSAR." *AkMen JURNAL ILMIAH* 8.3 (2011).
- Yoda, Tilawatil Cisetia, and Rina Febriani. "Analisis Ketimpangan Kemandirian Keuangan Daerah Menggunakan Indeks Williamson Pada Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat." *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi* 5.3 (2019).